

# Participatory <sup>Panduan</sup> Assessment

Disusun oleh :  
Konsorsium Hijau





# Participatory Assessment

Panduan

Disusun oleh :  
Konsorsium Hijau





# DAFTAR ISI

**Pengantar** ~ 5

Bab 1 : Pendahuluan ~ 8

Bab 2 : Alur Buku ~ 11

Bab 3 : Ringkasan Hasil Temuan

Tentang Krisis Ekologi di 16 Desa

- 1) Propinsi Nusa Tenggara Barat ~12
- 2) Propinsi Sulawesi Barat ~ 16
- 3) Propinsi Nusa Tenggara Timur ~ 19
- 4) Propinsi Bali ~ 25
- 5) Propinsi Jambi ~ 27

Bab IV : Apa Itu Participatory Assessment (PA)? ~ 31

Bab V : Teknik Pengorganisasian

- 1) Capaian Participatory Assessment (PA) ~ 37
- 2) Apa yang harus dilakukan dan Bagaimana Memulainya? ~ 38
- 3) Mendokumentasikan Data ~ 43

Bab VI : Penutup ~ 56

Lampiran – lampiran ~ 57

# KATA PENGANTAR

Kajian Keadaan Pedesaan secara Partisipatif dengan penggunaan pendekatan Participatory Assessment (PA), dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa situasinya, baik potensi maupun permasalahannya. Ini sangat berbeda dengan pendekatan 'top-down' yang sering dipakai oleh lembaga-lembaga yang hanya mengumpulkan informasi untuk kelancaran program mereka. Dalam program seperti itu, lembaga menentukan apa yang akan dikerjakan dalam suatu wilayah, masyarakat yang diikutkan tanpa diberikan pilihan apapun.

Berbeda dengan lembaga lain, Konsorsium Hijau justru meyakini bahwa pendekatan partisipatif sangat penting dalam merancang sebuah program. Melalui Participatory Assessment (PA), masyarakat diajak untuk memanfaatkan informasi dan menganalisa sendiri untuk mengembangkan rencana kerja mereka agar lebih maju dan mandiri.

Participatory Assessment (PA), adalah tahap pertama dalam siklus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah Participatory Assessment, masyarakat akan masuk tahap perencanaan kemudian pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Participatory Assessment (PA) adalah sebuah metode penelitian dalam ilmu sosial yang berusaha mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi informasi tentang macam-macam kondisi di pedesaan dan pengetahuan lokal yang ada di dalamnya. Informasi ini dihasilkan melalui kerjasama erat dengan penduduk lokal di

suatu wilayah. Karenanya metode penelitian dari pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi real yang terdapat di dalam masyarakat. Secara sederhana Participatory Assessment (PA) adalah pemetaan lanjutan yang berupaya memperdalam temuan-temuan penting dalam Rapid Assessment (RA).

Dalam konteks ini, maka Participatory Assessment, bermakna segala upaya menggali informasi mengenai masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di suatu desa demi tujuan perubahan sosial dan pembangunan. PA bertujuan untuk mengembangkan kapasitas komunitas suatu desa di dalam pembuatan keputusan, analisis situasi, perencanaan dan pemantauan.

Pada tahap perencanaan, Konsorsium Hijau telah melakukan proses Rapid Assessment (RA) di mana informasi dasar dikumpulkan untuk mengajukan pendekatan program pembangunan dan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perhatian yang perlu diajukan. Ketika program sudah berjalan, maka kombinasi RA dan PA bisa mulai dijalankan. Tetapi, harus diingat bahwa PA adalah proses yang panjang dan kompleks di setiap desa yang bertujuan menggali informasi terkait masalah masalah fundamental yang dihadapi masyarakat.

Setelah membaca buku panduan ini tentu diharapkan tidak hanya diperoleh sebuah pengetahuan tentang pelaksanaan PA. Lebih dari itu yang dinanti adalah semangat untuk terus mewujudkan partisipasi masyarakat yang ideal melalui penggalan pengetahuan secara mandiri. Program

Pengetahuan Hijau pada akhirnya hanya salah satu cara dari sekian banyak jalan untuk memacu semangat melestarikan lingkungan alam sekitar secara mandiri. Makin tercipta banyak kolaborasi dan inovasi, makin besar pula peluang mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan yang berorientasi kepada issue lingkungan.

Buku ini merupakan panduan teknis yang disusun oleh Konsorsium Hijau sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PA. Sebagian besar materi yang ada dalam buku ini merupakan materi teknis dalam tahap pelaksanaan PA yang merupakan rangkaian dari proses Gap Assessment. Tim Konsorsium Hijau yang menyusun buku panduan ini berupaya menyajikan materi secara sistematis, agar dari awal hingga akhir pelaksanaan PA semakin baik. Semoga dengan adanya buku ini para pihak yang berkomitmen tentang Pengetahuan Hijau semakin dipermudah dalam penerapannya.

Yogyakarta, Januari 2016

Tim Konsorsium Hijau

# BAB I

## PENDAHULUAN

Setelah melakukan Rapid Assessment (RA) di 16 desa pada bulan November-Desember 2015, maka pada tahap selanjutnya Konsorsium Hijau akan menyelenggarakan aktivitas yang lebih ditujukan pada pembangunan kapasitas masyarakat pedesaan. Tentunya, aktivitas ini didasarkan pada temuan-temuan krisis sosial ekologi yang telah didapatkan dalam RA, terkait tema Pertanian Terpadu, Energi Terbarukan, Kewirausahaan Hijau dan Perencanaan Spasial. Temuan-temuan dari 16 desa tersebut digali oleh 16 peneliti konsorsium hijau, yang akan terlibat kembali di dalam aktivitas pembangunan kapasitas masyarakat.

Aktivitas pembangunan kapasitas masyarakat ini biasa disebut sebagai Participatory Assesement (PA). Secara umum aktivitas ini akan merangsang dan menggerakkan masyarakat, terutama kaum muda pedesaan untuk berpartisipasi aktif di dalam menyelesaikan masalah-masalah di masing-masing desanya. Karenanya diperlukan cara ataupun metode tertentu yang bisa berdayaguna untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

Metode tersebut adalah semacam metode pengorganisasian masyarakat melalui media teks dan visual dengan isi tema-tema masalah krisis sosial ekologi sebagaimana yang sudah ditegaskan di muka. Pendek kata,

peran masyarakat, dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat diupayakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di desanya. Karenanya hasil akhir dari aktivitas PA yang direncanakan akan berlangsung selama dua minggu adalah terbentuknya forum-forum belajar masyarakat dengan rencana agenda kegiatan di setiap desa. Dalam konteks aktivitas Konsorsium Hijau, aktivitas pengorganisasian masyarakat ini akan melibatkan kerjasama antara peneliti, yang nantinya disebut fasilitator, dan manajer area.

Sebagai sasaran aktivitas, yang **pertama**, melalui metode PA ini akan diupayakan terbentuknya organisasi-organisasi warga desa yang akan berfungsi sebagai motor penggerak dari berbagai macam aktivitas partisipatif. Basis dari pembentukan organisasi ini adalah kesadaran warga desa akan pentingnya perubahan di tingkat desa, dan kehendak warga desa untuk melakukan tindakan-tindakan kolektif, baik untuk membahas dan menemukan solusi atas masalah-masalah krisis sosial ekologi di tingkat desa, maupun merealisasikan upaya jalan keluar dari masalah-masalah tersebut secara nyata/kongkret, terorganisasi, dan berkelanjutan.

Sasaran yang **kedua**, adalah terbentuknya forum-forum belajar masyarakat. Di dalam hal ini, forum-forum belajar dimaksudkan sebagai sarana masyarakat untuk mempelajari keluasan dan kedalaman dari macam-macam masalah yang ada di desa, baik itu yang berkaitan dengan agenda kerja organisasi, maupun yang di luar agenda. Diharapkan dari

forum-forum belajar ini akan dihasilkan sejumlah ide-ide inovatif untuk kepentingan warga desa.

Sasaran yang **ketiga**, sebenarnya adalah bentuk pengorganisasian pengetahuan dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan di tingkat organisasi maupun di forum belajar. Ini serupa upaya mendokumentasikan pengetahuan menurut karakteristik penyelesaian masalah oleh warga desa (jenis), dan pengetahuan lokal yang bersumber pada kearifan lokal warga desa (sumber).

Ketiga sasaran ini sudah tentu tidak bisa dibayang akan terwujud dalam jangka waktu yang singkat. Proses belajar masyarakat di dalam menjawab permasalahan-permasalahan di desanya sudah tentu berjalan dengan berbagai macam kendala, baik dari dalam maupun dari luar desa. Karenanya diperlukan sebuah acuan dasar untuk pembelajaran bersama baik bagi warga desa, fasilitator (peneliti), dan manajer area sebagaimana yang dituangkan dalam buku ini.

Besar harapan Konsorsium Hijau agar semua sasaran di muka bisa tercapai, karena ketiga sasaran itu akan menjadi tonggak-tonggak pencapaian dari perkembangan kapasitas masyarakat di dalam merumuskan masalah dan menyelesaikan masalah secara kolektif dan partisipatif. Sehingga apapun bentuk intervensi pembangunan yang akan dijalankan akan bertumpu pada perkembangan kapasitas masyarakat.

## **BAB II**

# **ALUR BUKU**

Bauku panduan Participatory Assessment (PA) ini adalah buku seri kedua tentang Gap Assessment, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari buku panduan sebelumnya (Buku Panduan Rapid Assessment). Sebagai bahan acuan pembelajaran, buku ini pertama-tama akan mengajak pembaca untuk melihat kembali temuan-temuan krisis-krisis ekologi yang berlangsung di sejumlah desa, diberbagai kabupaten dan provinsi sebagaimana yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebagai laporan Rapid Assessment (RA).

Pada bab selanjutnya buku ini akan memberikan penjelasan ringkas dan sederhana tentang apa itu metode partisipatoris. Ukuran kesederhanaannya terletak pada hal apa yang harus dilakukan oleh para fasilitator, manajer area, supervisor dan warga desa di dalam melakukan aktivitas partisipatif.

Terakhir buku ini akan memberikan semacam kiat-kiat ataupun teknik-teknik pengorganisasian warga desa untuk bisa berpartisipasi di dalam berbagai macam aktivitas partisipatoris.

## BAB III

# RINGKASAN HASIL TEMUAN TENTANG KRISIS EKOLOGI DI 16 DESA

### Propinsi NTB

#### 1. Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur

Desa Kumbang merupakan wilayah basis pertanian. Jumlah penduduk sebanyak 6.100 jiwa. Sandaran ekonomi utama adalah pertanian, meski, sebagian besar dari warga adalah buruh tani (1.120 orang), bukan petani pemilik lahan (519 orang).

Ada dua isu penting terkait krisis ekologi di desa ini. Pertama isu air, sehubungan dengan berkurangnya cadangan air yang disebabkan oleh musim kemarau yang panjang di tahun 2015 dan aktivitas penebangan hutan. Aktivitas penebangan hutan membuat kegundulan, hutan tidak lagi mampu menangkap dan menahan air, dan dampaknya kemudian selain berkurangnya debit air adalah bencana banjir yang melanda Dusun Kumbung Timur pada tahun 2014. Sementara, di Dusun Bangket Daya, ada embung air seluas 50 Ha yang dapat dioptimalkan untuk pengairan.

Terkait masalah air, masalah lain yang muncul adalah distribusi air yang tidak merata oleh karena kurangnya perawatan infrastruktur air. Persoalan kedua adalah pengelolaan limbah yang langsung dibuang ke sungai, termasuk kotoran sapi. Sudah ada upaya pengolahan limbah melalui program pemerintah dengan pembuatan instalasi Biogas di Dusun Kumbung Barat pada 2013, namun

karena warga belum memahami bagaimana memelihara instalasi tersebut juga karena lemahnya aspek pendampingan, saat ini kondisinya masih belum optimal dalam pemanfaatannya.

## **2. Desa Lendang Nangka Utara, Kabupaten Lombok Timur**

Desa ini merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Lendang Nangka Induk pada 2010. Terdiri dari 12 dusun, dengan jumlah penduduk sebesar hampir 10.000 jiwa. Desa ini adalah desa basis pertanian dan peternakan. Populasi ternak lebih dari 1.000 ekor di wilayah ini. Secara ekonomi, desa ini memiliki potensi yang kuat dari berbagai sektor: pertanian (tanaman padi dan palawija) dengan pemilik 529 orang, perkebunan (Nanas) dengan jumlah pemilik 1.750 orang, pertambangan, peternakan (ada populasi sapi sebesar 2.057). Perkebunan (buah dan tembakau) dari desa ini menguasai pasar di Kabupaten Lombok Timur dan Bali. Pupuk organik juga sudah diproduksi dengan konsumen dari luar desa. Wilayah ini juga basis pekerja migran perempuan (TKW) khususnya ke Malaysia, di mana saat ini terdapat 740 orang yang bekerja sebagai TKW.

Krisis ekologi yang berlangsung di wilayah ini adalah kerusakan ekosistem sebagai akibat dari penambangan batu apung dan batu hitam yang telah berlangsung sejak tahun 1988. Komoditas batu dari desa ini menunjukkan kualitas yang bagus, sehingga dipergunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok. Namun sebagai akibat dari maraknya penambangan batu tersebut, dampaknya kemudian adalah rusaknya kesuburan tanah dan berkurangnya debit air. Tanah bekas penambangan batu apung dan batu hitam tingkat kesuburannya berkurang dan

bahkan beberapa tanaman palawija sudah tidak mampu lagi tumbuh di sana.

### **3. Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah**

Desa Wajageseng terletak di sebelah utara kabupaten Lombok Tengah, di kaki Gunung Rinjani dan berada di ketinggian + 500 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk 8.121 jiwa. Perekonomian desa bersandar pada sektor pertanian. Ini ditopang dengan curah hujan yang relatif tinggi. Air bersih juga melimpah. Selain pertanian, peternakan adalah sandaran ekonomi kedua. Populasi sapi di desa berjumlah 2.300 ekor, dengan rata-rata pemilikan 1.5 ekor per orang. Desa Wajageseng kaya akan sumber daya alam lain yakni penambangan pasir galian-C, di dusun Lendang Pengkores yang kualitasnya dianggap terbaik di wilayah Lombok Tengah. Meski kaya SDA, separuh dari penduduk desa termasuk kategori miskin.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa desa Wajageseng merupakan desa yang kaya akan sumber daya alam, baik dari sektor pertanian, peternakan, pengairan irigasi, air bersih, dan penambangan pasir. Namun, krisis ekologi mulai dirasakan masyarakat antara lain kualitas lahan pertanian menurun karena praktek pertanian masih konvensional ketergantungan input dari luar, debit air semakin kecil yang menyebabkan kekeringan terbesar pada tahun ini, kegiatan penambangan pasir yang tidak memperhatikan kondisi sosial-ekologi masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat belum melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Pola pikir masyarakat masih sederhana,

masih terpusat pada diri manusia semata dan belum memikirkan keberlanjutan SDA untuk generasi tahun-tahun ke depan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan, keberlanjutan ekologi dan kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat masih rendah. Ketidaktahuan masyarakatlah yang melahirkan ketidakpedulian.

Krisis ekologi di desa ini adalah yang terkait dengan penurunan kualitas lahan pertanian, baik dari segi produktivitas lahan maupun dari segi alih fungsi lahan. Diduga penurunan ini adalah akibat penggunaan pestisida aktif karbofuran reduksi pertanian, dan penggunaan pupuk kimia anorganik yang sudah di luar batas. Musim kemarau panjang di tahun 2015 menambah daftar masalah ekologi terkait kekeringan lahan.

Krisis yang kedua adalah yang berkenaan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta. Aktivitas penambangan ini yang status hukumnya belum jelas selain mengakibatkan polusi udara, merusak jalan-jalan desa, juga menghasilkan kerusakan lahan, dan mengancam sumber resapan mata air.

#### **4. Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah**

Desa Aik Bual terletak di tepi hutan, di kaki Gunung Rinjani. Desa ini merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk Wajageseng pada tahun 2010. Luas wilayah sebesar 2,517 ha. Jarak desa dari ibukota kecamatan sejauh 13 Km dan jarak dari ibukota kabupaten sejauh 25,5 km. Jumlah penduduk sebesar 4.424 jiwa (2.120 laki-laki dan 2.304 perempuan). Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, peternak, tetapi sebagian lainnya ada yang bekerja

sebagai TKW.

Hasil studi menunjukkan bahwa ada Krisis Sosial ekologi di Desa Aik Bua, yang memiliki keterkaitan erat antara sumber daya manusia, akses sumber daya alam, informasi, kekuasaan, tradisi dan budaya serta sebaran program baik dari Dinas dan Instansi maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkegiatan di desa Aik Bual. Di sisi lain, Sistem pertanian, pemanfaatan energi serta pengelolaan hasil produksi di Desa Aik Bual dapat dikatakan aksesnya terbatas pada struktural. Disamping itu, secara khusus, program-program yang masuk ke desa dapat dikatakan sangat minim dalam menjamin keberlanjutan program.

Krisis ekologi yang dialami oleh desa ini adalah yang berkenaan dengan penebangan liar di kawasan hutan Gunung Rinjani, sesuai bencana angin ribut di tahun 2006. Dampaknya adalah, meningkatnya suhu udara di kawasan desa, maupun di kawasan hutan, dan menurunnya debit air. Penebangan masih berjalan lebih-lebih karena sudah terdapat industri sawmill dan mebel di desa.

## **Propinsi Sulawesi Barat**

### **5. Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat**

Desa Taan merupakan “Pintu Gerbang” Kabupaten Mamuju dan dilewati oleh jalur Trans Sulawesi dari Makassar. Letak Desa Taan kurang lebih 6 kilometer dari Ibukota Kecamatan Tapalang atau 40 kilometer dari ibukota Kabupaten Mamuju. Secara administratif Desa Taan terbagi 10 dusun. Luasnya 57.70 km<sup>2</sup>.

Desa dengan penduduk 3.480 jiwa (1.787 laki-laki dan 1.693 Perempuan) ini memiliki beberapa sektor perekonomian yang potensial yakni 1) sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi ikan, 2) sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditi utama yakni kakao, kemiri, merica, langsung dan durian, 3) kehutanan (kayu jati, uru, bayam, lingaru, dan eboni/kayu hitam), dan 4) pertambangan. Oleh karenanya, mata pencaharian utama penduduk desa ini adalah petani dan nelayan. Kecamatan Tapalang sendiri dikenal sebagai sentra tanaman kelapa di Kabupaten Mamuju. Selain itu, Desa Taan memiliki potensi di sektor pertambangan. Kandungan uranium yang saat penelitian ini dalam tahap penelitian oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Potensi tambang ini menjadi incaran beberapa negara asing antara lain; Amerika Serikat (AS), Rusia, China, dan banyak negara besar lainnya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Desa Taan memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan dan sektor perkebunan dengan komoditi utama yakni tanaman kakao. Saat ini, Desa Taan mengalami krisis sosial ekologi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan aparatur desa dan tidak adanya regulasi desa tentang pelestarian lingkungan. Selain itu di beberapa Dusun di Desa Taan khususnya yang berada di wilayah pegunungan mengalami krisis air bersih dan krisis listrik. Hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa Desa Taan mengalami krisis sosial. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan organisasi desa yang belum berfungsi optimal, dan ketidakmampuan lembaga di desa di dalam mengorganisasikan potensi-potensi ekonomi warga.

## **6. Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat**

Desa Tadui merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Bambu pada tahun 1993. Lokasi desa dari kota kecamatan sejauh 17 Km dan dari dengan pusat Kota Mamuju sejauh 19 Km.. Desa terdiri dari 8 dusun yang terdiri atas 23 rukun tetangga. Jumlah penduduk Desa Tadui pada tahun 2014 adalah 3.809 jiwa (1.834 laki-laki dan 1.975 perempuan).

Mata pencarian utama masyarakat Desa Tadui adalah petani atau pekebun dengan komoditas utama kakao. Selain pertanian atau perkebunan kakao, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Desa Tadui juga bekerja sebagai petani rumput laut dan empang atau tambak yang membudidayakan udang vaname dan ikan bandeng. Wilayah desa ini didominasi lahan kering untuk perkebunan kakao.

Kemarau panjang dan serangan hama penyakit beberapa tahun terakhir ini menyebabkan masyarakat mengalami gagal panen pada perkebunan kakao dan budidaya rumput laut. Area kerusakan rumput laut yang dibudidaya oleh masyarakat di pesisir Desa Tadui disebabkan oleh kegiatan perikanan yang menggunakan metode yang merusak (penggunaan bahan peledak). Ini merusak terumbu karang dan ikatan tali untuk budidaya rumput laut di dasar dan di terumbu karang.

## **Propinsi NTT**

### **7. Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah**

Desa Tana Modu adalah desa pemekaran (dari Desa Malinjak) pada tahun 2009. Desa ini memiliki musim hujan hanya 4-5 bulan dalam setahun. Mata pencaharian utama adalah pertanian dari persawahan tadah hujan (301ha), ladang (199 ha), perkebunan rakyat (seluas 277 ha) yang ditanami jambu mete, kemiri, dan kopi. Jumlah penduduk 1544 jiwa (laki2 782 jiwa dan perempuan 762 jiwa).

Pertanian di Desa Tana Modu terdiri dari persawahan tadah hujan yang didominasi pada Dusun I dan Dusun II serta beberapa bahagian dari Dusun III, sedangkan Ladang/padi ladang di dominasi pada Dusun III dan Dusun IV. Sumber makanan utama dari Desa Tana Modu adalah Ubi, Jagung dan beras. Ubi-ubian kesehariannya disajikan sebagai pengganti Kue/atau roti jajan yang disajikan kepada tamu yang datang atau jika ada acara-acara pertemuan-pertemuan di tingkat Dusun dalam satu Desa. Tentu selalu ada sirih pinang yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Sumba.

Kondisi sosial budaya Desa Tana Modu lebih didominasi oleh ajaran Kristen Protestan dan Katholik, sedangkan kelompok kepercayaan Marapu yang dulunya merupakan ajaran yang dipegang dan dianut masyarakat Sumba mulai berkeser ke arah liturgi gerejawi, walaupun dalam prakteknya, saling toleransi tetap menjadi dasar atas sebuah perbedaan. Gereja bagi masyarakat Tana Modu berperan penting dalam menentukan kapan waktunya untuk memulai musim tanam di kebun/ladang (Padaku ruku), sembahyang selesai tanam padi (mbaha wi) dan sembahyang Panen (padete kaweda)

yang dituangkan kedalam tata ibadah khusus gereja. Penentuan setiap tahapan ibadah tersebut (penentuan waktu) dilakukan dengan cara musyawarah di gereja.

Kehidupan sosial budaya di Tana Modu tidak terlepas dari kehidupan adat istiadat secara keseluruhan di kabupaten Sumba tengah. Salah satu yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang terkait dengan sosial ekonomi adalah kesepakatan adat batasan hewan besar (kerbau, kuda, sapi dan babi) yang disembelih maksimal 3 ekor serta pembatasan lamanya menyemayamkan mayat /atau orang mati maksimal 3 hari harus di kuburkan. Desa Tana Modu memiliki 10 kesepakatan moral salah satu kesepakatan tersebut adalah bahwa setiap kk atau orang/anak muda harus mempunyai kebun sendiri untuk diusahakan kalau tidak akan diberikan sanksi tidak menerima RASKIN, karena warga tersebut tidak menggarap lahannya yang diasumsikan bahwa dia tidak miskin pangan lagi.

Setiap kesepakatan yang dibuat, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan musyararah kampung yang di tandai dengan “KAKALAK dan KAYAKA” (pekikan yel-yel khas Sumba) sebagai tanda bahwa musyawarah kampung sudah mendapatkan kata sepakat (khususnya di Desa Tana Modu). Dalam musyawara kampung warga Desa bersepakat memberikan sebuah rumah adat mereka sebagai pusat belajar dan informasi pengetahuan hijau, bagi mereka dan pada tahun 2016 akan mengadakan pameran Desa yang akan memamerkan potensi-potensi Desa yang dimiliki Desa Tana Modu.

Krisis ekologi terkait kondisi kekeringan akibat kemarau panjang, yang berakibat pada kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Warga terpaksa

mengambil air di danau (berjumlah 3) atau mata air (berjumlah 6) yang masih mengalir dengan jaraknya tempuh berkisar 1 Km-3Km ke sumber air.

#### **8. Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah**

Desa ini berada di ketinggian 900 m di atas permukaan laut, dengan luas 70 km<sup>2</sup> yang sebagian adalah wilayah Taman Nasional Tana Daru. Sumber mata pencarian dari desa ini adalah pertanian dan peternakan. Populasi desa ini hanya sebesar 744 jiwa, dengan karakteristik gender 374 laki-laki dan 370 perempuan, yang terhimpun dalam 134 kepala keluarga.

Akibat yang timbul dari birokrasi pemerintahan desa yang diwarnai model *personalized exchange* dapat dilihat pada tata kelola pemerintahan desa di Ngadu Olu tidak ubahnya seperti bangun relasi antar Kabisu yang bergeser ke ranah formal pemerintahan. Dominasi elit Kabisu yang memiliki modal ekonomi dan modal sosial menyelenggarakan pemerintahan dengan mengabaikan partisipasi dari bawah. Inisiatif dari perangkat desa mandul sehingga hampir semua peran diambil oleh Kades. Keadaan ini memiliki dua sisi; Pertama, Kades menganggap tidak didukung oleh staf yang memadai sehingga dia tampil dominan. Dia butuh inovasi dan gerak cepat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sebagai desa baru.

Kedua, dominasi itu semakin menutup peluang bagi perangkat untuk ikut mengelola pemerintahan sebagaimana mestinya. Akibat yang timbul kemudian Kades terlihat sangat menonjol dan terkesan serba bisa, sedangkan

elemen lain terkesan pasif dan menunggu instruksi. Akhirnya, pemerintahan desa berjalan timpang karena sebagian perangkat merasa tidak difungsikan. Akan jadi lebih baik seandainya praktek deliberatif diterapkan Kades. Walau dia dianggap punya langkah cepat dan bagus dalam pembangunan dan mencari peluang bantuan desa, tetapi tidak berarti dia harus mengabaikan peran perangkat dalam kerangka pemberdayaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Buruknya tata kelola pemerintahan desa di Ngadu Olu membuat lembaga-lembaga di desa yang bersifat korporatis tidak bisa bersalin rupa menjadi lembaga partisipatif yang memberi manfaat berkelanjutan. Kesan bahwa lembaga-lembaga itu dibentuk hanya sebatas untuk menyalurkan dan menerima bantuan dari supra desa tidak bisa dihindari. Sehingga program-program yang bisa memiliki dampak berkelanjutan berhenti karena inisiatif warga tidak bisa dipupuk, karena seolah-olah semua selesai di tangan kepala desa. Fenomenanya kemudian seperti tanah yang merekah di musim kemarau, saat hujan tiba, air yang turun langsung lenyap meresap ke dalam rekahan tanah dan tidak berbekas. Demikian juga bantuan dan program yang datang berupa proyek, diterima kelompok lalu tidak begitu jelas dampak berkelanjutan yang diharapkan. Semua lenyap ditelan tanah, dan semua hanya bisa memaklumi, karena tidak cukup mekanisme kontrol yang disiapkan, baik melalui tata kelola maupun cara-cara khusus. Patronase Maramba-Kabisu dalam kehidupan Parokial mereka telah meredam persoalan-persoalan itu ke dalam tanah dan benak warga desa.

Krisis ekologi yang berlangsung di desa ini terkait juga dengan persoalan air, tetapi lebih berkenaan dengan

pengelolaan air akibat kerusakan bendungan. Selain itu desa ini juga masalah dengan akses terhadap energi terkait kegagalan proyek-proyek instalasi biogas dan energi surya.

### **9. Desa Napu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur**

Merupakan desa yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah. Desa ini terdiri dari dua dusun, dengan luas 14,26 km<sup>2</sup>. Jaraknya sejauh 67 km dari ibukota kabupaten di Waingapu. Struktur sosial kemasyarakatan berbasis klan. Ada 216 KK di desa ini. Hampir 94% adalah petani.

Mata pencaharian utama desa ini adalah pertanian tadah hujan untuk jenis komoditas jagung, ubikayu dan sayuran. Desa tidak memproduksi beras, karenanya beras didatangkan dari luar wilayah Desa Napu. Krisis pangan adalah salah satu krisis yang ada di desa ini. Kegiatan peternakan adalah mata pencaharian utama kedua. Karena besarnya populasi ternak, desa ini memiliki potensi untuk pengembangan pupuk organik.

Selain krisis pangan, Desa Napu mengalami konflik tanah. Ada dua jenis konflik yakni konflik kepemilikan tanah perbatasan (antar desa), dan konflik tanah antara warga dengan perusahaan. Sebelumnya ada investor yang akan membangun perusahaan bio farm di desa ini pada 2013 dan 2014, tapi perusahaan mundur dari rencana awal. Krisis ekologis lain adalah bencana alam (kebakaran, angin ribut, kekeringan dan krisis air bersih). Krisis dimulai pada tahun 1970an saat pembakaran padang ditujukan untuk mendapatkan tunas baru untuk makanan ternak dilakukan secara berkala, dan menjadi bagian dari kebiasaan.

## **10. Desa Tanggedu, Kecamatan Kenatang, Kabupaten Sumba Timur**

Desa ini merupakan desa persiapan hasil pemekaran dari Desa Mondu, sehingga secara definitif masih ikut dalam Desa Mondu. Desa ini berpenduduk 351 jiwa dengan mata pencaharian utama pertanian dan peternakan.

Secara umum krisis sosial ekologi yang terjadi di desa ini terkait dengan masalah kekeringan akibat kondisi alam yang kurang bersahabat, seperti curah hujan yang rendah, musim kering yang panjang, dan topologi yang kurang menguntungkan. Walaupun wilayah ini cenderung basah oleh karena adanya dua aliran sungai, dan 8 mata air yang mampu mencukupi kebutuhan desa namun ketika musim hujan tiba kualitas air menjadi keruh bercampur tanah dan kotoran. Sementara pada musim kemarau, hanya wilayah yang dekat sumber mata air yang mendapatkan air. Akibatnya kemudian adalah pada kualitas kesehatan warga.

Krisis sosial ekologi lain adalah yang berkenaan dengan pembakaran lahan, dan penebangan pohon yang belum diimbangi dengan upaya penanaman pohon kembali secara optimal. Gangguan ternak dan pembakaran lahan menjadi sumber dari terhambatnya upaya penanaman pohon kembali.

## **PROPINSI BALI**

### **11. Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng**

Desa Pejarakan merupakan salah satu desa pesisir yang ada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Wilayah desa ini meliputi kawasan hutan produksi, hutan lindung (Taman

Nasional Bali Barat), pemukiman dan lahan pertanian (lahan tadah hujan). Ketinggian tanah dari permukaan laut 0-100 meter. Desa Pejarakan merupakan salah satu desa binaan Taman Nasional Bali Barat sejak 1995. Jumlah penduduk di desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak adalah 3.000 orang dengan komposisi perempuan 1.470 jiwa dan laki-laki 1.530 jiwa. Mata pencarian penduduk desa ini adalah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Namun untuk beberapa dusun di wilayah pesisir, mata pencariannya adalah nelayan dan petani garam.

Krisis sosial ekologi yang berlangsung di desa ini adalah yang terkait dengan minimnya ketersediaan air. Salah satu sebabnya adalah, pembukaan lahan tanpa kendali sejak periode reformasi yang berakibat pada berkurangnya resapan air. Sebab lainnya adalah, pembuatan tambak udang dengan membabat 98 hektar hutan mangrove yang berakibat pada menurun jumlah lahan. Sebagai akibatnya lagi kemudian terjadi kegagalan panen kebun jeruk, dan menurunnya kedalaman air sumur warga. Akibatnya berkurang pakan ternak oleh karena tanaman pakan ternak hanya menghasilkan sedikit daun.

## **12. Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng**

Desa Bengkala merupakan salah satu desa yang secara administratif masuk ke dalam wilayah kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Jumlah warga sebanyak 3017 jiwa dengan 885 KK dan semua memeluk agama Hindu. Mata pencarian dari penduduk desa ini mayoritas bekerja sebagai petani ataupun buruh tani.

Krisis sosial ekologi di desa ini adalah yang berkenaan

dengan ketersediaan air, dan ancaman kekeringan. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya debit sumber air yang dipergunakan oleh masyarakat desa Bengkala. Ini disebabkan oleh adanya penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa lain yang berada di daerah sumber mata air yang dipergunakan oleh masyarakat desa Bengkala.

## **PROPINSI JAMBI**

### **13. Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Desa ini merupakan desa transmigran dengan mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa, semenjak tahun 1980an. Penduduk Desa Pandan Lagan ini berjumlah 2.102 Jiwa, Luas wilayah 14,9 Km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk 141,07 jiwa/ Km<sup>2</sup>.

Krisis sosial ekologi yang terjadi di desa ini adalah yang terkait dengan ketergantungan petani pada tanaman sawit sebagai satu-satunya sumber penghasilan mereka. Sementara di lain pihak fakta menunjukkan bahwa komoditas sawit sedang mengalami penurunan harga.

Krisis sosial ekologi lainnya adalah yang berkenaan dengan ketersediaan air bersih. Air dari sungai Batanghari belum bisa dikonsumsi, begitu juga dengan air dari dalam tanah gambut. Air tanah yang berhasil digali dengan bor sedalam 40 meter hanya dipergunakan oleh warga untuk cuci dan kakus. Sedangkan untuk kebutuhan makan dan minum warga membeli Aqua galon,. Terutama bagi yang tidak mampu pada musim penghujan mengumpulkan air hujan untuk kemudian digunakan sebagai air untuk kebutuhan sehari-hari.

### **14. Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten**

## Tanjung Jabung Timur

Desa Suka Maju, adalah desa transmigrasi dengan mayoritas penduduk yang berasal dari etnis Jawa, Sunda, dan Melayu. Mata pencaharian utama penduduk adalah petani, pekebun dan peternak, selain profesi-profesi lain di bidang jasa dan perdagangan. Jumlah penduduk sebanyak 2291 jiwa, dengan komposisi gender laki-laki (1.214 orang), perempuan (1.077 orang) yang semuanya terhimpun dalam 701 Kepala Keluarga.

Krisis sosial ekologi yang berlangsung di desa ini adalah yang terkait dengan ketersediaan air bersih. Secara umum, warga Desa Sukamaju memperoleh air untuk berbagai keperluan dari sumber-sumber: (a) air sumur, (b) air sungai, (c) air hujan. Untuk keperluan khusus, warga membeli air galon yang dijual di toko-toko kelontong atau didistribusikan oleh pedagang keliling.

Krisis sosial ekologi yang selanjutnya adalah yang berkenaan dengan pengelolaan sampah. Pada umumnya warga mengelola sampah dengan cara: (a) dibakar, (b) ditimbun di pekarangan, (c) dibuang ke pekarangan atau sungai. Secara umum belum ditemukan inisiatif warga untuk menangani kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah komunal dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Krisis sanitasi dan kesehatan lingkungan pemukiman khususnya pada pembuangan tinja ditemukan pada sebagian warga desa, terutama di lokasi pemukiman warga dengan kondisi wc yang masih belum memiliki jamban keluarga atau jamban bersama (>25%). Warga ini pada umumnya masih melakukan BAB di pekarangan dan berpindah-pindah dengan menggali beberapa lokasi di

pekarangan rumah mereka. Kondisi demikian terutama ditemukan di keluarga kurang mampu dengan kondisi rumah semi permanen.

#### **15. Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi**

Desa Tangkit merupakan salah satu desa di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki wilayah yang luas dan potensi sumber daya alam yang cukup banyak. Jumlah penduduk Desa Tangkit pada tahun 2014 yaitu 10.082 jiwa dengan jumlah laki – laki sebanyak 5.300 jiwa dan perempuan 1.368 jiwa serta 1.817 rumah tangga. Mata pencaharian penduduk umumnya bekerja sebagai petani, peternak, namun masyarakat ada juga yang memilih sumber mata pencaharian sebagai karyawan swasta, wiraswasta, pegawai negeri sipil, perajin batu bata, usaha rumah tangga dan usaha jasa lainnya. Jenis pertanian yang diusahakan yaitu pertanian sayuran, buah pepaya, perkebunan karet, kelapa sawit, pinang dan kakao. Usaha peternakan yang diusahakan yaitu peternakan sapi dan kambing serta perikanan lele dan gurami.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Desa Tangkit merupakan wilayah desa yang mulai berkembang, karena lokasi desa berbatasan langsung dengan Kota Jambi. Desa Tangkit merupakan desa yang heterogen, baik dari aspek suku bangsa, maupun jenis pekerjaan. Desa Tangkit mengalami krisis sumber air pada musim kemarau terutama pada lahan usahatani. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat yakni menggunakan sumber air Sungai Tangkit walaupun kondisi sungai tergolong tercemar.

Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian rakyat khususnya pada usaha pertanian terpadu; Desa Tangkit memiliki potensi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Krisis sosial ekologi di desa ini berkenaan dengan masalah ketersediaan kepemilikan lahan, kurangnya modal dan ketergantungan dengan pupuk kimia cukup tinggi. Desa ini juga mengalami krisis air, sehubungan dengan curah hujan yang rendah serta banyaknya bangunan dan lahan industri menyebabkan menurunkan daerah resapan air.

#### **16. Desa Kasang Lopak Alai, terletak di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi**

Desa ini merupakan dengan luas  $\pm 700$  ha ( $\pm 7$  km<sup>2</sup>) yang terdiri dari tanah sawah  $\pm 100$  ha, tanah pekarangan  $\pm 300$  ha, tanah perkebunan  $\pm 150$  ha, dan tanah tegalan  $\pm 150$  ha. Mayoritas mata pencarian penduduk desa ini adalah sebagai petani sawah ataupun petani perkebunan. Jumlah penduduk Desa Kasang Lopak Alai adaah 1.919 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 513 KK, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1016 jiwa, perempuan 903 jiwa.

Krisis Ekologi di desa ini adalah yang terkait dengan perubahan kepemilikan lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Kasang Lopak Alai. Beberapa petani menggarap lahan dengan cara "numpang", yaitu petani menggarap lahan yang bukan milik mereka disertai perjanjian dengan pemilik lahan. Lahan yang dikerjakan oleh petani banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha dari Kota Jambi maupun dari kota-kota yang lain.

## **BAB IV**

### **APA ITU PARTICIPATORY ASSESSMENT (PA) ?**

Metode penelitian Participatory Assessment (PA) berdasar pada satu titik berangkat dan satu titik tujuan yang sama, yaitu kapasitas komunitas pedesaan yang terlibat. Pengertiannya, penelitian didasarkan atas kemampuan komunitas di dalam melakukan observasi, pencatatan hasil observasi, pembahasan hasil observasi, pemilah-milahan hasil observasi, analisa dan penyimpulan hasil observasi, dan penyebarluasan hasil observasi. Pengandaiannya, kapasitas pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah komunitas berkemungkinan menjadi proses belajar komunitas untuk melakukan eksperimen-eksperimen perubahan sosial.

Karenanya, tata urutan berpikir (baca: epistemologi) dari metode PA berkebalikan dengan metode penelitian konvensional, ataupun metode Rapid Assessment (RA) yang baru-baru ini sudah dan sedang dilaksanakan oleh para peneliti Konsorsium Hijau. Jika pada metode RA peneliti dari luar komunitas merancang dan memutuskan apa obyek-obyek permasalahan krisis sosio ekologis yang akan diteliti di wilayah komunitas, maka pada metode PA warga komunitas yang membahas obyek-obyek tersebut dan

memutuskan jalan keluarnya secara partisipatif. Dengan kata lain, awal pencarian kebenaran tidak dimulai dari individu yang melihat obyek dan membaca referensi terkait obyek, tetapi dari pengetahuan dan atau pengalaman warga komunitas tentang obyek yang akan diobservasi ataupun diteliti.

Hal pengetahuan dan pengalaman warga komunitas pedesaan ini penting, oleh karena pengalaman mereka bertani misalnya, memunculkan pengetahuan tentang sistem bertani yang spesifik, kontekstual dengan alam dan iklim wilayah desa, plus aspek-aspek kultural yang menyertainya. Pengetahuan dan pengalaman ini sifatnya melekat satu dengan yang lain, melekat dalam aktivitas keseharian petani maupun kebiasaan-kebiasaannya. Ketika pengetahuan dan pengalaman ini diartikulasikan oleh petani, maka hasilnya adalah narasi tentang peristiwa-peristiwa pertanian lengkap dengan suka-dukanya. Karenanya metode PA di sini tidak berusaha mengajari petani atau warga komunitas untuk memilah-milah mana yang obyektif dan mana yang subyektif dari sebuah pendapat seorang petani misalnya, tetapi justru membangun logika berpikir kolektif berdasar narasi-narasi tersebut.

Hal kolektivitas ini juga menempati posisi penting dalam PA, mengingat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh warga komunitas pedesaan, ataupun individu petani dibangun secara kolektif baik melalui unit-unit kelompok

sosial maupun melalui tradisi. Namun realitasnya saat ini, hal kolektivitas tersebut di dalam banyak hal dikacaukan oleh macam-macam dampak perkembangan dari luar desa, ataupun konflik sosial dari dalam desa. Akibatnya pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi terfragmentasi baik antar dusun, antar klan, atau bahkan kelompok-kelompok politik di desa. Lebih jauh lagi dampaknya adalah pada munculnya ketidakpercayaan antar dusun misalnya, lemahnya kepemimpinan sosial di desa, dan semacam “ketundukan” warga desa terhadap segala sesuatu yang datang dari luar desa. Karenanya metode PA ini semacam 'terapi' bagi komunitas desa untuk mengembalikan karakter kolektivitasnya, menemukan kembali harkat dan martabatnya melalui aktivitas-aktivitas partisipatif.

Problematik dari metode PA adalah pada peneliti/fasilitator. Mengapa karena dalam banyak kasus peneliti yang sudah melakukan RA, sepertinya sudah menemukan solusi jitu untuk setiap masalah yang kasat mata ada di pedesaan. Sehingga ketika peneliti bertransformasi menjadi fasilitator, maka sang fasilitator diharapkan untuk lebih peka terhadap informasi yang disampaikan oleh warga. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang dianggap masalah oleh peneliti pada masa RA, belum tentu dianggap masalah oleh warga desa. Karenanya, peneliti di sini bukanlah 'solusi' bagi desa, melainkan lebih berfungsi sebagai 'stimulan' bagi warga desa untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas partisipatif, dan berlaku sebagai 'fasilitator' di dalam setiap aktivitas

partisipatif.

Fungsi 'stimulan' bagi peneliti / fasilitator ini tidak mudah, karena warga desa mempunyai kalender aktivitasnya yang spesifik, pola komunikasi dan interaksi tertentu yang perlu dipelajari oleh peneliti/ fasilitator. Ini belum termasuk sentimen-sentimen negatif warga desa terhadap mereka yang datang dari luar desa. Karenanya peneliti/fasilitator perlu berbaur dengan warga desa, agar masalah 'jarak' antara orang dari luar desa dengan orang dari dalam desa tidak mengemuka. Lebih jauh lagi, dengan berbaur maka peneliti/fasilitator dapat memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang dikemukakan oleh warga, dan lambat laun akan memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan warga desa ke dalam berbagai bentuk pertemuan.

Fungsi 'fasilitator' juga tidak sederhana. Peneliti harus mencari cara (baca: kreatif) agar warga yang bersedia terlibat dalam aktivitas partisipatif, bisa mengartikulasikan pikiran-pikirannya, baik itu pengetahuannya ataupun pengalamannya, sampai kemudian warga bisa menemukan obyek masalah apa yang perlu didiskusikan, dan merumuskan secara bersama jalan keluar partisipatif dari masalah tersebut.

Hasil akhir dari PA bagi warga: adalah sebuah proses belajar bersama secara berkelanjutan untuk adanya pembahasan terhadap masalah-masalah krisis ekologi dan berikut jawaban atas krisis tersebut dalam perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Sementara bagi peneliti adalah temuan tentang proses belajar masyarakat di dalam membangun desanya secara mandiri.

**Tabel Perbandingan RA dan PA :**

<b>RA</b>		<b>PA</b>
Inform Project Design, mengumpulkan informasi dasar, untuk kemudian dimonitor dan dievaluasi	<b>Tujuan</b>	Pengembangan kapasitas komunitas pedesaan di dalam pembuatan keputusan, analisis situasi, perencanaan, dan pemantauan
Tim terdiri dari para ahli (ilmu sosial/ilmu alam) dari organisasi yang akan meneliti pedesaan	<b>Tim</b>	Tim terdiri dari warga desa, yang bisa difasilitasi oleh tim ahli, atau staf ahli yang bekerja dengan komunitas
Lokasi tertentu yang representatif	<b>Lokasi</b>	Lokasi tempat tinggal komunitas di mana proyek riset dijalankan
Studi tertutup (12 hari)	<b>Masa Kerja</b>	Berkelanjutan seiring dengan masa hidup proyek. Biasanya dimulai dengan pelatihan analisis awal situasi yang kemudian berlanjut pada

		Rencana Tindak Lanjut Komunitas
Akan dijelaskan di bagian yang lain	<b>Sarana dan Teknik Riset</b>	Akan dijelaskan di bagian yang lain
Laporan lengkap, ditulis dengan baik, yang menangkap kedalaman dan kompleksitas informasi yang didapatkan dari penelitian	<b>Dokumenta si</b>	Buku Log Desa dengan catatan-catatan tentang temuan-temuan utama, aktivitas, dan Rencana Tindakan Komunitas.

*Sumber: Buku panduan rapid assessment*

# **BAB V**

## **TEKNIK PENGORGANISASIAN**

### **A. Capaian Participatory Assessment (PA)**

Semua penelitian begitu juga dengan PA tentunya memiliki tujuan. Participatory Assessment yang akan dilaksanakan inipun memiliki beberapa keluaran (output) yang ingin dicapai, yakni:

1. Menghimpun pengetahuan (sumber dan jenis) yang pernah atau masih berkembang ditengah masyarakat desa. Pengetahuan yang dimaksud pada tiga isu utama yakni (energi terbarukan, pertanian terintegrasi, kewirausahaan hijau dalam dimensi perencanaan wilayah/spasial planing).
2. Menyusun rencana pembangunan desa yang terkait dengan isu pengetahuan hijau (terutama pada bidang energi terbarukan, pertanian terintegrasi dan kewirausahaan hijau) yang difasilitasi peneliti/fasilitator dan manager area.
3. Memberikan rekomendasi tentang dimensi serta indikator dalam pengukuran pengelolaan lingkungan di desa atau yang diistilahkan sebagai *Green Village Score*.

4. Rekomendasi mengenai bagaimana *Community Learning Center (CLC)* diorganisir hingga kurikulum yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.
5. Pembentukan organisasi (tim desa) untuk *Community Learning Center (CLC)*.

## **B. Apa yang harus dilakukan dan Bagaimana Memulainya?**

1. Persiapan Penyelenggaraan PA di tingkat desa (I)
  - 1.1. Pertemuan Persiapan PA

Agenda:

- a) Perkenalan
- b) Penjelasan dan diskusi tentang PA, tentang proyek pembangunan desa hijau, dan sejauh mana jangkauan dan cakupan dari proyek pembangunan desa hijau
- c) Diskusi tentang pengorganisasian aktivitas PA
  - apa masalah utama di desa? Dan apa kira-kira penyelesaiannya?
  - siapa di desa yang bisa jadi mitra membangun desa untuk menyelesaikan masalah utama di muka?
  - bagaimana jika kita melibatkan mitra-mitra itu untuk menjalankan PA?
  - kapan sekiranya kita bisa membuat pertemuan dengan mereka?

- siapa yang akan mengundang, menghubungi mereka untuk pertemuan yang lebih besar?
- siapa yang akan bertanggung jawab mempersiapkan pertemuan yang lebih besar dengan para mitra?

Peserta : Peneliti Utama/Supervisor, Local Expert, Area Manager, Peneliti/fasilitator, Pandu Tanahair

Catatan:

- pertemuan bagian pertama ini bisa dilakukan secara bertahap tergantung situasi dan kondisi Pandu Tanahair.
- Mitra: mereka yang punya semangat membangun desa, diupayakan para pimpinan/tokoh formal/informal (laki dan perempuan) dilibatkan, termasuk juga para pemuda ataupun kelompok2 pemuda desa

## 2. Persiapan Penyelenggaraan PA tingkat desa (II)

Agenda:

- 2.1. Perkenalan dan Presentasi materi visual terkait isu utama (opsional)
- 2.2. Diskusi bersama para mitra
  - sejauh mana warga mengetahui isu/masalah utama tersebut?

- apakah warga sadar bahwa isu/masalah utama tersebut berdampak buruk bagi desanya?
- apa saja yang sudah dilakukan warga untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut?
- apa kira kira yang bisa diupayakan oleh warga untuk mencari jalan keluarnya? Bagaimana bentuk jalan keluarnya?

Peserta : Peneliti/fasilitator, manajer area, Pandu Tanahair, dan mitranya

Catatan : diskusi ini bisa juga dilakukan secara bertahap tergantung kemampuan warga. Yang lebih diutamakan dalam diskusi ini adalah inisiatif warga di dalam mendiskusikan, memikirkan jalan keluar dari masalahnya. Karenanya juga Pandu Tanahair diharapkan bisa mengartikulasikan ide-idenya.

### **3. Penyelenggaraan PA**

- a. Diskusi tentang jalan keluar terhadap masalah desa.  
Target : tindakan konkret semacam aktivitas riil untuk menjawab permasalahan utama.
- b. Perencanaan dan pengorganisasian aktivitas riil bersama warga desa:
  1. Pembentukan tim kerja desa
    - apa-apa saja yang perlu dikerjakan

(pembagian kerja)

- siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab
- apa apa saja sasaran capainya
- apa-apa saja tantangannya
- kapan mulai dilaksanakan
- bagaimana penganggaran dananya
- bagaimana ide jalan keluar ini bisa diterima masyarakat, dan apakah masyarakat sedia terlibat dalam aktivitas riil
- bagaimana cara mengajak masyarakat agar bisa meyakinkan mereka bahwa jalan keluar ini yang paling realistis

Catatan : diskusi / FGD ini juga bisa dilakukan secara bertahap

Peserta : fasilitator, Area Manager, Pandu

Tanahair dan anggota komunitasnya

## 2. Tugas dan pembagian kerja pelaksana PA:

Kerja lapangan tahap II akan dilaksanakan oleh:

1. Supervisor (expert) bertugas untuk:
  - a) Melakukan pengawasan dan pengarahan agar participatory assessment dapat mencapai tujuan/output yang diharapkan.
  - b) Melakukan review terhadap laporan yang disusun oleh peneliti dan manager area mengenai hasil participatory assessment. Baik laporan harian,

- laporan interview, laporan FGD, dan laporan akhir tiap desa.
- c) Menyusun laporan akhir disetiap kabupaten.
- 
2. Manager Area, yang bertugas untuk
    - a) Menyiapkan Pandu Tanahair yang akan ikut serta dalam participatory assessment.
    - b) Memfasilitasi peneliti dan Pandu Tanahair agar dapat melakukan participatory assessment dengan baik, misalnya mengorganisir pelaksanaan FGD.
    - c) Melakukan pengorganisasian agar terbentuk tim desa (organisasi) community learning center.
  
  3. Peneliti/fasilitator, yang bertugas untuk:
    - a) Memfasilitasi Pandu Tanahair agar dapat menggali data dan informasi mengenai desanya.
    - b) Menyusun laporan hasil Participatory Assessment perdesa.
    - c) Menghimpun pengetahuan (sumber dan jenis) pada tiga isu utama (energi terbarukan, pertanian terintegrasi, kewirausahaan hijau dalam dimensi perencanaan wilayah/spasial planing).
    - d) Membuat rekomendasi mengenai indikator green village score.
    - e) Membuat rekomendasi mengenai muatan kurikulum (substansi) community learning center.
    - f) Memastikan proses participatory assessment agar mencapai tujuan dan output yang direncanakan.

4. Pandu Tanahair
  - a) Melakukan penelitian bersama peneliti/fasilitator mengenai masalah dan potensi di desanya.
  - b) Bersama peneliti/fasilitator memperdalam temuan-temuan penting Rapid Assessment (penelitian sebelumnya).
  - c) Menyusun rencana pembangunan desa yang terkait dengan isu pengetahuan hijau (terutama pada bidang energi terbarukan, pertanian terintegrasi dan kewirausahaan hijau) yang difasilitasi peneliti/fasilitator dan manager area.
  - d) Proses PA bersifat terus menerus, artinya sekalipun pelaksanaan PA sudah selesai para Pandu Tanahair bisa melanjutkan dan mengembangkan metode pemeriksaan/penelitian di desanya secara mandiri.

### **C. Mendokumentasikan Data**

Aktifitas ini dilakukan oleh peneliti/fasilitator, walaupun dalam prakteknya, para Pandu Tanahair bisa juga melakukan secara mandiri. Teknik pendokumentasian data diawali dengan merekam wawancara dengan menggunakan alat perekam digital (misalnya yang ada di hand phone Anda). Namun demikian, perlu diingat bahwa Anda bisa menghentikan perekaman kalau responden menjadi tidak nyaman atau akan menyentuh masalah yang sensitif.

Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah membuat catatan dengan tulisan tangan yang mendetail selama wawancara berlanjut. Setelah wawancara sudah selesai,

Anda diminta untuk secepatnya (tidak lebih dari 24 jam) melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Setelah mengecek rekaman membuat 'interview summary', yaitu yang meringkas garis besar dari jawaban reponden yang paling menarik/penting. Masukkan kutipan dari responden yang paling menarik dengan mencatat posisi (waktu) jawaban/kutipan tersebut di rekaman.
2. Meng-copy file audio dan dokumen interview summary di Basecamp. Perkirakan setiap wawancara akan berlanjut sekitar 1,5 jam. Ingat, Anda selalu bisa bertemu dengan narasumber lagi untuk melanjutkan wawancara jika tidak cukup waktunya.

## 1. Mekanisme Pelaporan

Jenis Laporan (lihat lampiran):

1. Laporan Focus Group Discussion (FGD)
2. Laporan interview
3. Laporan Harian
4. Laporan Akhir

Untuk mempermudah dalam proses pelaporan, Konsorsium Hijau mengembangkan system informasi pelaporan yang disebut File Manager.

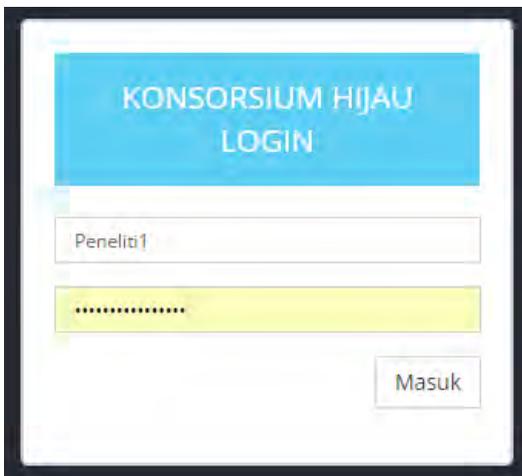
**File Manager** adalah aplikasi kecil untuk membantu pengelolaan dokumen di internal Konsorsium Hijau yang dapat digunakan untuk sharing dokumen diantara para peneliti yang akan diterjunkan oleh Konsorsium Hijau.

**File Manager** mempunyai fitur untuk download dokumen dan upload dokumen, namun download dan upload harus melalui proses Login terlebih dahulu. Berikut fitur fiturnya :

## 1. Login

Untuk masuk ke sistem, untuk men submit laporan dan hal hal lain yang berkaitan dengan gap assessment di lapangan, masuk ke url : <http://konsorsiumhijau.org/admin>.

Sehingga akan tampak halaman login seperti pada gambar dibawah ini :



Inputkan username dan password sesuai username dan password yang telah diberikan oleh administrator. Username adalah nama depan, dengan password no telpon aktif.

Klik tombol masuk, dan anda akan mendapatkan tampilan seperti pada gambar berikut ini :



Pada kolom sebelah kiri akan muncul menu/fitur yang bisa diakses oleh peneliti seperti berita dan agenda, dan file manager.

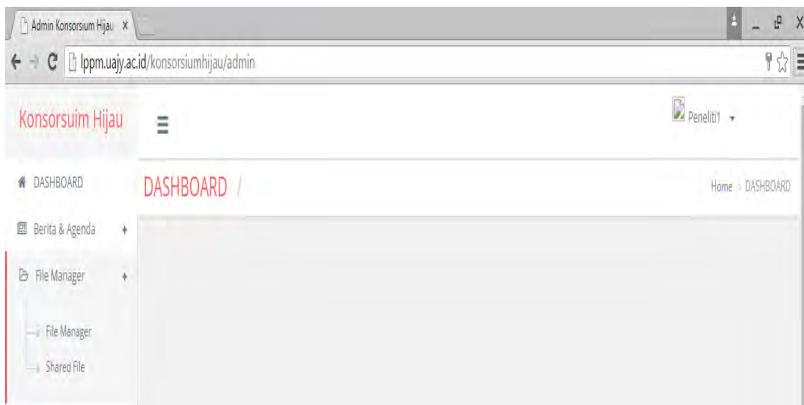
Menu/Fitur Berita dan Agenda, terdiri dari 3 submenu yaitu : Berita, Agenda Kegiatan, dan Pengumuman. Sub menu Berita berisi informasi mengenai berita-berita yang dilakukan oleh Konsorsium Hijau. Sub Menu Agenda Kegiatan berisi informasi Agenda Kegiatan Konsorsium Hijau, dan Sub Menu Pengumuman yang berisi pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan Konsorsium Hijau.

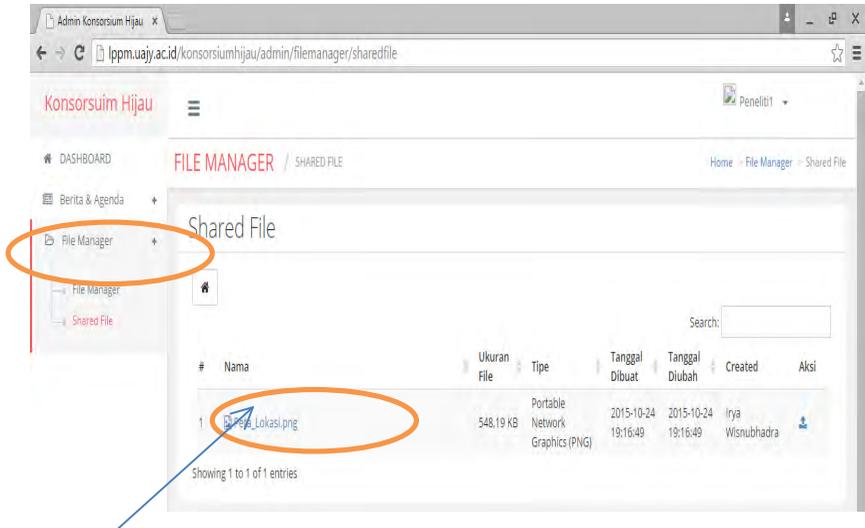
Menu/Fitur File Manager adalah fitur yang bisa digunakan oleh peneliti untuk men-download atau meng -upload dokumen yang berkaitan dengan tugas tugasnya. Menu/Fitur File Manager terdiri dari dua sub menu File Manager dan Shared File. Sub Menu File Manager adalah fitur untuk mengelola dokumen yang ingin kita simpan, shared/submit, dan menghapusnya. Sedangkan shared file adalah fitur

untuk mendownload file yang di share oleh administrator.

## 2. Download Dokumen

Para peneliti dapat mendownload dokumen-dokumen yang telah disharingkan oleh administrator seperti panduan, template laporan, dll. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses pada menu File Manager → Shared File.

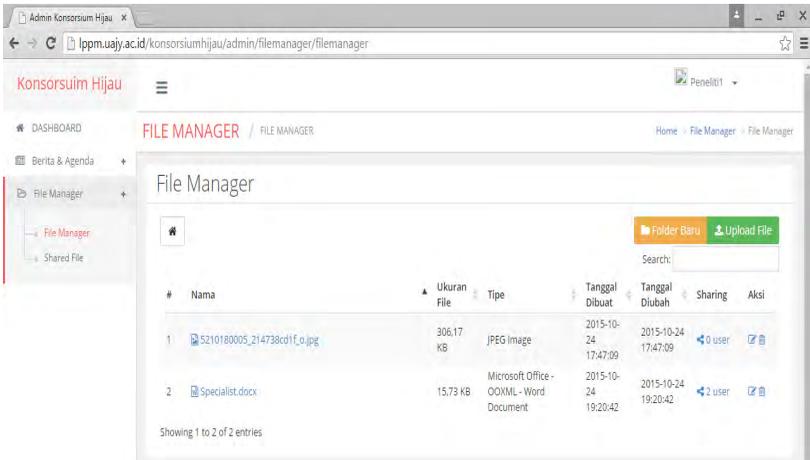




File yang ada di shared file dan siap di download

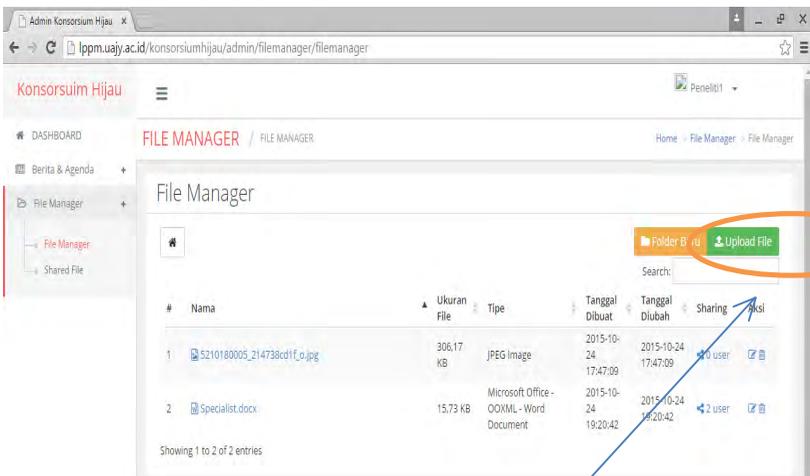
### 3. Mengelola dokumen / Submit Laporan / Upload Dokumen

Para peneliti dapat mengirimkan laporan atau dokumen lainnya secara online melalui aplikasi ini, Fitur yang bisa digunakan adalah fitur melalui sub Menu File manager, yang bisa diakses melalui menu File Manager → File Manager yang tampak pada gambar dibawah ini :



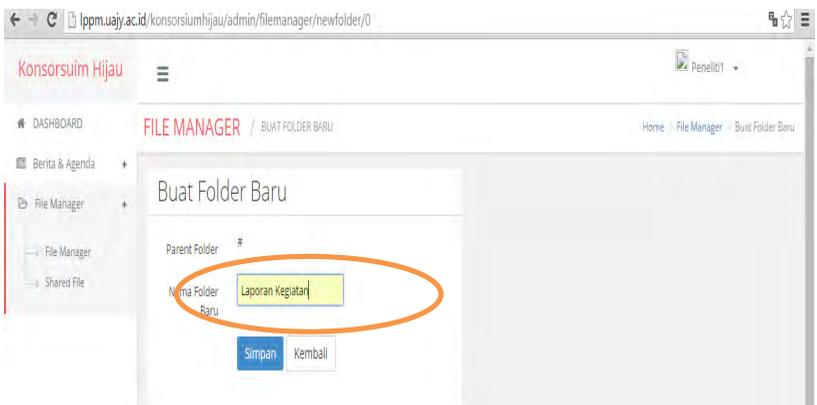
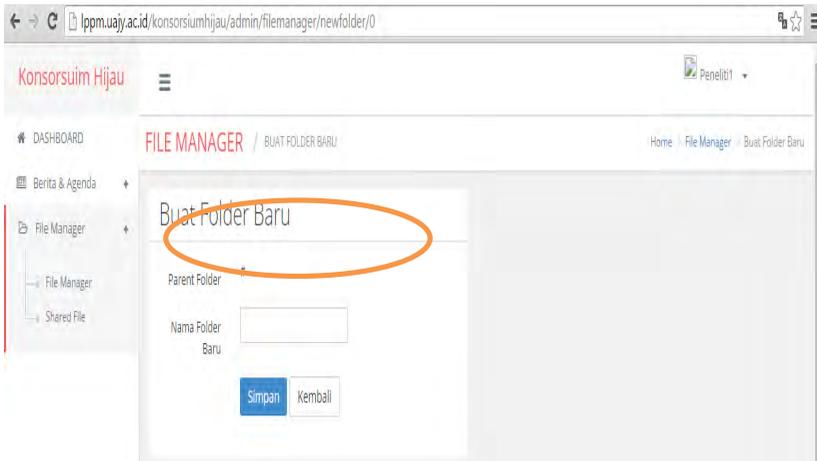
## Membuat Folder Baru

Peneliti dapat membuat folder baru jika diinginkan, folder dapat digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen menjadi satu kesatuan yang rapi

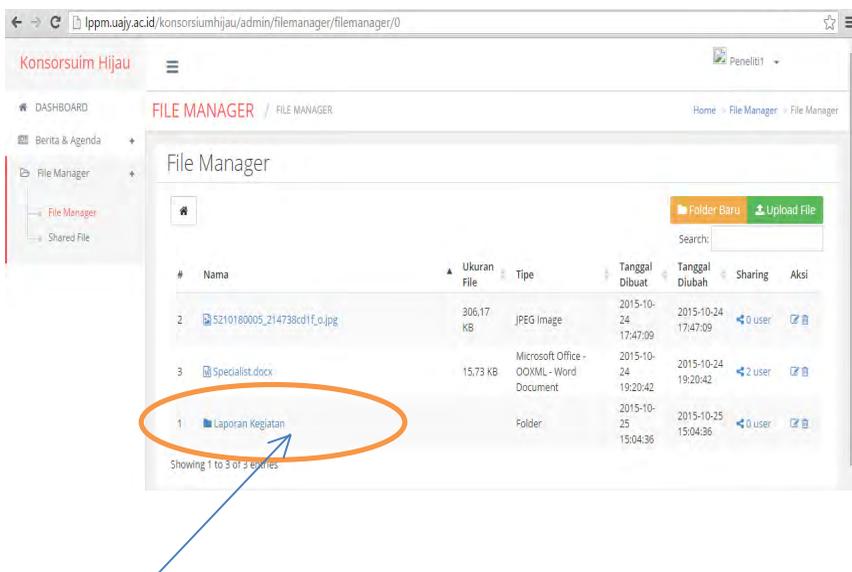


Klik untuk membuat folder baru

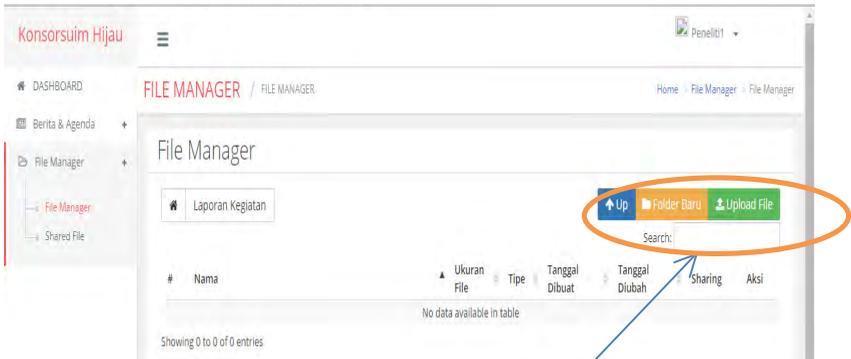
Menu yang dapat digunakan adalah folder baru, yang digunakan untuk membuat folder baru tempat menyimpan dokumen. Jika menginginkan membuat folder baru klik folder baru, yang tampak pada gambar berikut :



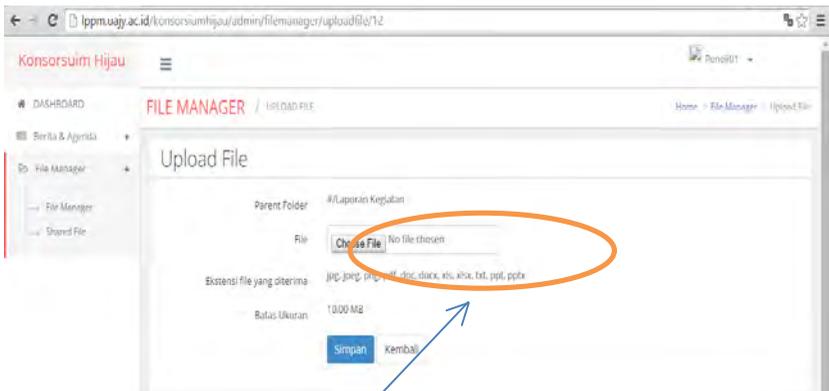
Klik Simpan, maka akan folder akan tercipta. Folder tampak seperti pada gambar berikut :



Untuk menyimpan file dalam folder, klik folder Laporan Kegiatan.



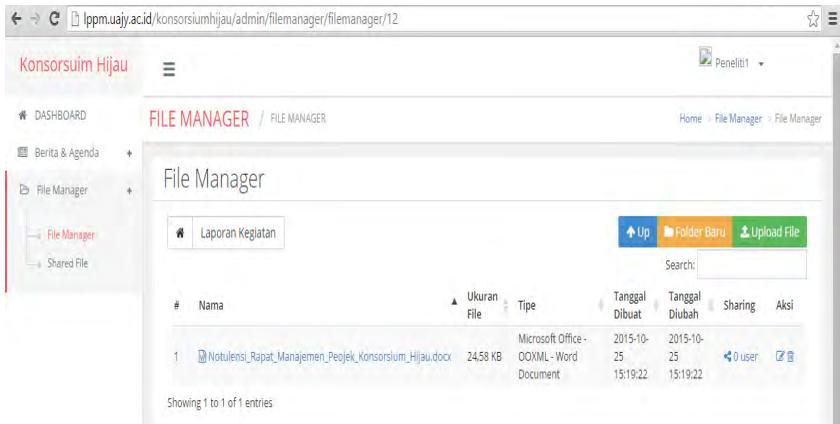
Klik untuk upload data



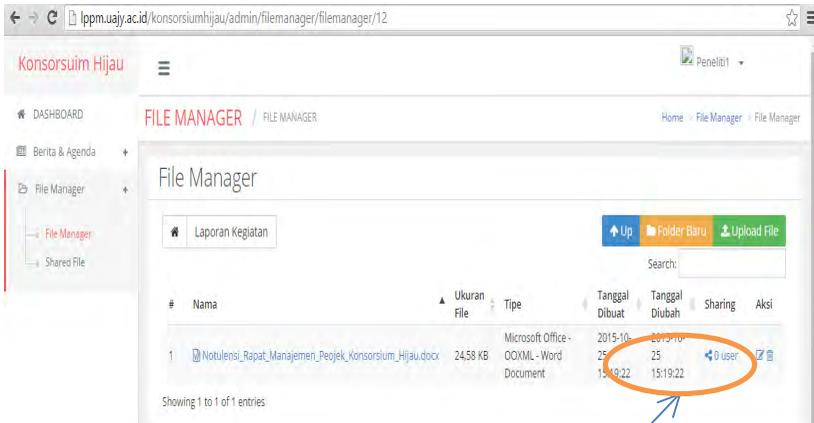
Klik Choose File

Klik choose file, pilih file untuk diupload dan selanjutnya klik simpan.

Maka file telah tersimpan dalam folder, yang dapat dilihat seperti pada gambar berikut :

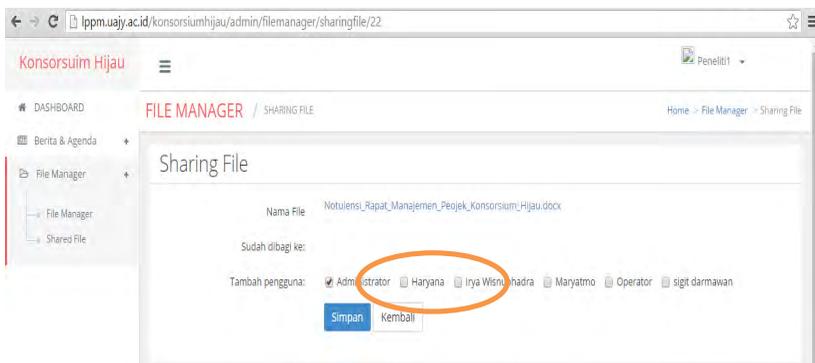
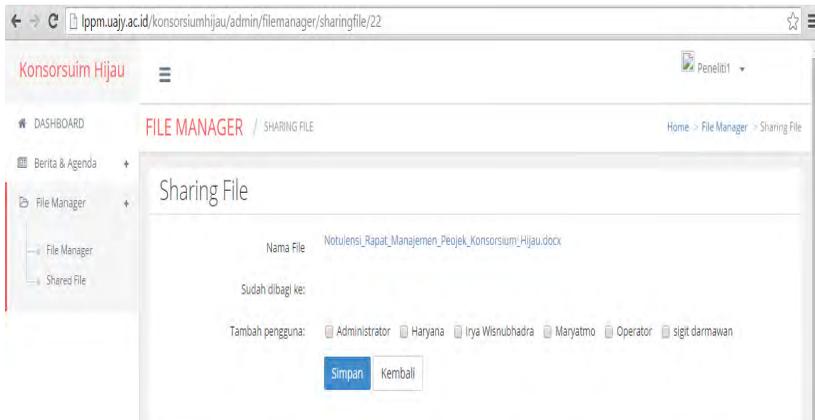


Untuk melaporkannya ke administrator peneliti harus melakukan share dokumen tersebut dengan meng klik user dibawah header table sharing.



Klik Share User

Sehingga akan tampak seperti layar berikut, setelah itu check Administrator, dan klik Simpan.



# **BAB VI**

## **PENUTUP**

Buku Panduan Participatory Assessment (PA) ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti/fasilitator dan Pandu Tanaair serta pihak-pihak lain yang akan melaksanakan penelitian dalam rangka menjawab krisis sosial ekologi diberbagai bentang alam dan ruang di desa masing-masing.

Panduan ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), code of conduct serta arahan dari Area Manager di setiap kabupaten lokasi program.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

## Lampiran 1

### Laporan Focus Group Discussion (FGD)

Nama Kegiatan	
Hari/tanggal	
Waktu	
Tempat	
Peserta	
Metode FGD	
Hasil-hasil FGD	



### Lampiran 3

#### Identitas Pemeriksa

Nama Pemeriksa	
Hari/Tanggal	
Desa/Kabupaten/Provinsi	

Hari dan Jam			
Tempat			
Kegiatan			
Teknik	Interview / Observasi / lainnya		
Deskripsi singkat temuan pemeriksa			
Dokumen pendukung		<b>Jenis</b>	<b>Nama File</b>
		Audio	
		Video	
		Foto	
		Dokumen	
		Lainnya	

Hari dan Jam	
Tempat	
Kegiatan	

Teknik	Interview / Observasi / lainnya		
Deskripsi singkat temuan pemeriksa			
Dokumen pendukung		<b>Jenis</b>	<b>Nama File</b>
		Audio	
		Video	
		Foto	
		Dokumen	
		Lainnya	

Hari dan Jam	
Tempat	
Kegiatan	
Teknik	Interview / Observasi / lainnya
Deskripsi singkat temuan pemeriksa	

Dokumen pendukung		<b>Jenis</b>	<b>Nama File</b>
		Audio	
		Video	
		Foto	
		Dokumen	
		Lainnya	

*\*dalam satu hari **bisa** terdiri dari beberapa kegiatan*

---

## **Lampiran 4**

Penyerahan laporan final paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses di lapangan selesai.

### **Struktur Laporan**

Laporan Final dari masing-masing peneliti ditulis sesuai sistematika sebagai berikut :

#### **Judul**

#### **Abstract**

#### **Bab I : Pendahuluan**

Pengantar singkat tentang latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan serta metode dalam PA ini. Melengkapi deskripsi mengenai desa dari berbagai aspek, temuan penting dan menarik tentang krisis ekologi yang berhasil diidentifikasi dalam RA, pengantar tema utama (3 issue) dalam penelitian ini dan hal-hal lain yang terkait dengan PA.

#### **Bab II : Deskripsi lokasi pemeriksaan**

Bab ini lebih pada melengkapi tentang deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi meliputi aspek:

1. Topografi dan Geografi (bukan sebatas lokasi fisik, tapi juga relasi desa dengan desa lain, atau relasi desa dengan kota, dan dilihat secara makro di unit kabupaten).

2. Kondisi ekologi-sosial-ekonomi-SDA
3. Struktur masyarakat.
4. Pemetaan aktor dan institusi sosial desa
5. Regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam.

### **Bab III : Hasil Temuan**

Mengklarifikasi dan memperdalam lagi hasil-hasil temuan sementara yang berhasil muncul dalam RA dan sekaligus mengidentifikasi temuan-temuan lain yang belum ada dalam penelitian sebelumnya.

1. Local Knowledge (sumber dan jenis) yang pernah atau masih berkembang ditengah masyarakat desa.
2. Rencana pembangunan desa yang terkait dengan isu pengetahuan hijau.
3. Indikator dalam pengukuran pengelolaan lingkungan alam di desa atau yang diistilahkan sebagai *Green Village Score*.
4. Pengorganisasian Pandu Tanahair
5. Konsep *Community Learning Center (CLC)*

### **Bab IV : Analisis**

Mempertajam analisis hasil temuan dikaitkan dengan output yang telah ditargetkan yang dikaitkan dengan :

1. Local Knowledge.
2. Perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi.
3. Dimensi dan ukuran Skor Desa Hijau ( *Green Village Score*)

4. Ide dan gagasan Pembentukan tim desa (Pandu Tanahair).
5. Kebutuhan kurikulum dan mekanisme pengorganisasian *Community Learning Center (CLC)*

## **Bab V : Rekomendasi**

Upaya merekomendasikan kepada para pihak yang berkomitmen dalam pengembangan dan pemberdayaan pengetahuan hijau di setiap level. (*Pemdes, pemda, pemerintah nasional, LSM lain, Konsorsium Hijau, Lembaga donor, dll*). Rekomendasi ini bersifat substantive dan teknis sehingga mempermudah para pihak menindaklanjuti dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Hasil rekomendasi inilah yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan program pengetahuan hijau di desa masing-masing.

## **Bab VI : Penutup**

*Contoh : MATRIK RANGKUMAN PA*

Nama Desa: .....

Nama Desa	Masalah Krisis Ekologis terkait Tema Program			
	Pertanian terpadu	Energi Terbarukan	Kewirausahaan Hijau	Perencanaan Spasial (Governance)
<p><b>POTENSI</b></p> <p>Mendiskusikan potensi menyangkut produk/komoditas, SDM, organisasi (tidak terbatas pada organisasi produksi, tetapi juga organisasi kemasyarakatan, agama, budaya/adat yang ada di desa)</p>	<p>Potensi komoditas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kakao</li> <li>- Perikanan</li> </ul> <p>Potensi SDM (termasuk potensi kepemudaan)</p> <p>Potensi Kelembagaan: adakah kerja-kerja kolektif yang lebih menonjolkan semangat swadaya/gotongroyong</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air yang cukup di pegunungan</li> <li>- Sinar matahari</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunitas perajin</li> <li>- Komunitas usaha tani/pengolah</li> <li>- Lembaga keuangan yang ada ?</li> <li>- Adakah koperasi?</li> </ul>	<p>Adakah program-program pemerintah yang sedang dan akan dikerjakan di desa?</p>
<p><b>PERMASALAHAN</b></p>	<p>1. SDM Petani kakao dan nelayan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- limbah ..... (apa saja) melimpah</li> </ul>		<p>Bagaimana peran</p>

	<p>2. Pengolahan hasil kakao</p> <p>3. Harga saat panen raya</p> <p>4. Terbatasnya infrastruktur khususnya jalan usahatani, bangunan konservasi air dan infrastruktur lainnya</p>	<p>tidak tergarap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaatan air tidak optimal</li> <li>- infrastruktur konservasi air</li> <li>- listrik di daerah pelosok</li> </ul>		<p>masyarakat dalam perencanaan desa?</p> <p>Kendala dan masalahnya</p>
<p><b>AKAR MASALAH</b></p> <p>Mencari faktor-faktor “penyebab” masalah.</p> <p>(diskusi eksplorasi permasalahan lebih mendalam, misal bagaimana kondisi pada tahapan/aspek produksi, pada tahapan/aspek rantai distribusi)</p> <p>→ bisa menggambarkan kondisi “oligarki” di desa</p>				

<b>ALTERNATIF STRATEGI PEMECAHAN MASALAH</b>				
<b>PERAN STAKEHOLDER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah desa dan yang di atasnya</li> <li>- Peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dll</li> </ul>				
<b>PERAN PEMUDA</b>				
<b>RENCANA AKSI</b> Langkah-langkah yang akan dikembangkan ke depan (Rencana Aksi)				
<b>PRIORITAS</b>				

<ul style="list-style-type: none"><li>- Prioritas (mana yang lebih didahulukan, mana yang dikemudikan)</li><li>- Strategi membangun kekuatan bersamanya (organisasi) bagaimana</li></ul>				
--	--	--	--	--